August 2021

Catatan Mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir dan Protokolnya

Rudi Rizki
The Habibie Center, rudi.rizki@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>

Part of the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Rizki, Rudi (2021) "Catatan Mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir dan Protokolnya," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 1 : No. 4 , Article 10.

DOI: 10.17304/ijil.vol1.4.569.1

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol1/iss4/10>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Expert Commentary

Catatan Mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir Dan Protokolnya

Rudi Rizki*

Pendahuluan

Globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi telah membuka peluang lebih besar terhadap peningkatan komunikasi antar manusia dan perkembangan perekonomian negara-negara. Namun kemajuan ini telah menimbulkan dampak yang signifikan bagi berkembangnya kejahatan yang terorganisir. Pada akhir abad ke-20 timbul bentuk-bentuk baru kerjasama diantara kelompok-kelompok kejahatan yang terorganisir. Perkembangan pesat ini telah menjadi kekhawatiran bagi lebih dari seratus negara yang berpartisipasi dalam konferensi-konferensi yang dilangsungkan untuk merumuskan Konvensi Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir dan tiga Protokolnya. Upaya masyarakat internasional untuk mengembangkan instrumen hukum guna memerangi kejahatan terorganisir transnasional atau yang bersifat lintas batas negara (*transnational organized crime/TOC*) dilatarbelakangi kenyataan bahwa permasalahan tersebut dirasakan sebagai ancaman yang sangat serius terhadap keamanan dan ketertiban negara-negara sehingga untuk pencegahan dan penanggulangannya memerlukan kerjasama internasional.

Penekanan akan pentingnya kerjasama internasional tersurat dalam maksud dan tujuan dari Konvensi, yang dalam Pasal 1 nya menyatakan bahwa maksud dari Konvensi ini adalah guna memajukan kerjasama untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemerangan kejahatan yang terorganisir. Untuk itu berbagai ketentuan dalam

* Penulis adalah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung. Beliau mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung (1983), Master of Laws dari University of Melbourne Australia (1993). Selain aktif mengajar, beliau saat ini juga sebagai hakim Ad Hoc Pengadilan HAM dan sebagai staf ahli The Habibie Center.

Konvensi dimaksudkan sebagai instrumen bagi para aparat penegak hukum dan badan-badan terkait untuk mendorong dan mengkoordinasikan langkah-langkah pencegahan serta untuk membantu dan melindungi korban. Walaupun berbagai negara telah memiliki instrumen hukum untuk mengatasi kejahatan terorganisir, namun tidaklah semua negara memilikinya. Untuk itu Konvensi ini juga dimaksudkan untuk mendorong negara-negara yang belum memilikinya agar mengadopsi langkah-langkah yang komprehensif dan memberikan panduan untuk melakukan langkah-langkah legislasi dan kebijakan guna mencegah dan memerangi kejahatan ini. Disamping itu Konvensi ini juga memuat standarisasi atau mengkoordinasikan kebijakan, legislasi dan administrasi nasional serta penegakan hukumnya agar upaya global untuk mengendalikannya lebih efisien dan efektif.

Instrumen hukum internasional ini dirancang dalam bentuk satu Konvensi induk dan tiga protokol, dimaksudkan demi fleksibilitas baik dalam perundingan untuk pembentukannya maupun dalam peratifikasiannya oleh negara-negara. Untuk itu negara-negara diberi kebebasan untuk meratifikasi Konvensi saja atau seluruhnya sekaligus dengan semua protokolnya atau hanya Konvensi dengan salah satu atau dua protokol saja sesuai dengan kepentingan nasionalnya masing-masing. Namun untuk meratifikasi salah satu protokolnya negara harus meratifikasi Konvensinya terlebih dahulu. Hal ini diartikan bahwa setiap protokol harus dibaca dan diterapkan sejalan dengan isi Konvensi.

Sebagaimana halnya perjanjian internasional (*treaty*) pada umumnya, konvensi dan ketiga protokolnya merupakan perjanjian internasional yang mengikat negara-negara peratifikasinya dan mewajibkan negara-negara tersebut untuk melakukan pengimplementasiannya.

Pokok-pokok Konvensi dan Protokol

Konvensi dan ketiga protokolnya mewajibkan negara-negara penandatangan dan peratifikasinya untuk melakukan langkah-langkah untuk memerangi kejahatan transnasional yang terorganisir. Tujuan dasar dari kewajiban ini adalah untuk memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan tersebut. Untuk itu sangat ditekankan pentingnya standar minimum yang mendasar bagi sebanyak mungkin negara untuk melakukan tindakan-tindakan menentang kejahatan lintas batas yang terorganisir. Maksudnya adalah agar tidak ada tempat berlindung yang aman dimanapun (*no safe havens principle*) untuk melakukan kejahatannya lintas batas yang

terorganisir, termasuk untuk menyembunyikan barang bukti maupun untuk menempatkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Selain itu ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen hukum ini ditujukan guna menjamin supaya pendekatan legislasi nasional dan penegakan hukum yang dilakukan oleh berbagai negara dikoordinasikan agar langkah-langkah kolektif secara internasional menjadi efisien dan efektif. Untuk itu instrumen ini menetapkan standar minimum yang mendasar bagi negara-negara, tetapi diharapkan pula agar langkah-langkah domestik itu bisa lebih optimum lagi, sesuai dengan kebutuhan nasionalnya ataupun karena didasarkan kepada perjanjian bilateral atau regional.

Secara garis besarnya ketentuan dalam instrumen-instrumen tersebut dapat di bagi ke dalam tujuh bagian sebagai berikut: *Pertama, Pengertian-pengertian*. Pasal pertama dari setiap instrumen memberikan pengertian-pengertian terhadap peristilahan yang digunakan dalam instrumen yang bersangkutan, yang mengandung unsur-unsur dari kejahatan yang harus dirumuskan sesuai dengan instrumen-instrumen tersebut. Selain itu juga menentukan tentang dalam keadaan-keadaan bagaimana ketentuan-ketentuan yang relevan dapat diterapkan. Pencantuman peristilahan ini memberikan acuan untuk pembakuan terminologi yang akan sangat membantu negara-negara dalam legislasi nasionalnya.

Kedua tentang persyaratan kriminalisasi. Konvensi membagi empat kategori kejahatan yang spesifik yaitu; partisipasi dalam kelompok kejahatan (Pasal 5), Pencucian uang (Pasal 6), korupsi (Pasal 8) dan gangguan terhadap peradilan (Pasal 23) yang harus diperangi yang biasanya digunakan untuk mendukung kejahatan lintas batas yang terorganisir. Sedangkan ketiga protokolnya mengatur kejahatan-kejahatan lainnya secara spesifik pula, yaitu, perdagangan manusia (*trafficking of persons*), penyelundupan migran (*smuggling of migrant*) dan penyelundupan atau pembuatan senjata api secara ilegal (*smuggling or illicit manufacturing of firearms*). Dalam praktek kebanyakan negara untuk jenis kejahatan-kejahatan tersebut diancam dengan hukuman penjara minimum empat tahun sehingga dikategorikan sebagai kejahatan yang serius. Ketiga protokol tersebut juga merinci kejahatan-kejahatan ringan yang biasanya mendukung kegiatan awal dari kejahatan lintas batas yang terorganisir seperti pemalsuan dokumen perjalanan, pemalsuan nomor seri senjata api. Konvensi ini hanya untuk diterapkan kepada kejahatan-kejahatan yang dirinci dalam ketiga protokol tersebut. Negara peratifikasi instrumen-instrumen ini yang belum memasukkan jenis-jenis kejahatan tersebut sebagai tindak pidana dalam hukum nasionalnya diharuskan untuk

mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang memasukkan kejahatan-kejahatan tersebut sebagai kejahatan menurut hukum nasionalnya.

Ketiga tentang tindakan-tindakan negara untuk memerangi kegiatan kejahatan terorganisir. Negara-negara diwajibkan untuk membuat peraturan perundang-undangan nasional berikut upaya penegakannya guna mencegah dan menanggulangi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kejahatan terorganisir. Misalnya untuk memerangi kejahatan pencucian uang, negara-negara harus mensyaratkan bahwa setiap bank yang beroperasi di wilayahnya wajib memiliki pencatatan data yang akurat dan agar aparat penegak hukum diberi akses untuk keperluan inspeksi. Rekening bank yang anonim harus dilarang dan kerahasiaan bank tidak boleh digunakan untuk melindungi kegiatan kriminal. Tindakan-tindakan tersebut harus didukung oleh aturan nasional lainnya misalnya dengan menentukan aturan perbankan yang menyatakan bahwa tidak dilakukannya pencatatan bank secara akurat merupakan pelanggaran peraturan perbankan yang dapat dihukum. Untuk memerangi perdagangan dan penyelundupan manusia, protokol mencantumkan standar minimum untuk memproduksi, mengeluarkan dan verifikasi paspor dan dokumen-dokumen perjalanan lainnya.

Keempat, mengenai kewajiban bekerjasama. Sejak semula para perumus Konvensi menyadari betul akan pentingnya kerjasama antar penegak hukum dan badan-badan yang terkait untuk memerangi kejahatan terorganisir. Oleh karena itu Konvensi mewajibkan negara-negara pesertanya untuk melibatkan diri dalam komitmen untuk memberikan bantuannya kepada negara lain dalam hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir sebagai suatu masalah bersama dan memberikan bantuannya untuk kasus-kasus yang spesifik. Hal yang dimaksud dengan kerjasama menurut Konvensi termasuk ekstradisi dan bantuan hukum secara timbal balik (Pasal 16 dan 18) serta tindakan-tindakan yang lebih spesifik, seperti kerjasama dalam penegakan hukum, pengumpulan dan pertukaran informasi. Protokol-protokol itu juga memberikan pengaturan tambahan yang merinci kerjasama secara lebih spesifik, misalnya mengenai bantuan untuk melacak senjata api, ataupun bantuan mengenai pengidentifikasian warganegara yang ditemukan di negara lain yang berstatus sebagai migran selundupan, orang yang diperjual belikan ataupun sebagai pelaku kejahatan terorganisir.

Kelima, pelatihan dan bantuan teknis. Sejumlah pasal dalam instrumen hukum tersebut mewajibkan negara-negara peserta untuk memiliki tenaga lokal yang memiliki keahlian dalam masalah

kejahatan transnasional yang terorganisir dengan mensyaratkan tersedianya fasilitas pelatihan. Hal ini tentunya menyulitkan bagi negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya dan dana yang terbatas. Untuk itu Konvensi dan ketiga protokolnya mencantumkan seruan bagi negara maju untuk memberikan bantuan teknis berupa keahlian kepada negara-negara berkembang. Selanjutnya Pasal 30 Konvensi menyerukan negara-negara untuk meningkatkan bantuan finansial dan material untuk mendukung upaya negara-negara berkembang dalam memerangi kejahatan transnasional yang terorganisir dan pengimplementasian Konvensi. Dalam pasal tersebut juga diserukan agar negara-negara memberikan sumbangan yang layak dan sukarela secara reguler melalui mekanisme pendanaan PBB. Bahkan untuk maksud tersebut Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 30 ayat 2 (d) menganjurkan penggunaan dana dari hasil penyitaan barang bukti kejahatan transnasional terorganisir sesuai dengan mekanisme hukum nasional masing-masing negara. Jika dibaca ketentuan dari rancangan Resolusi Majelis Umum tahun 2000 dinyatakan bahwa pengelolaan dana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 tersebut diserahkan kepada *UN Crime Prevention and Criminal Justice Fund*, dan menyerukan kepada negara-negara untuk segera memberikan sumbangannya dalam rangka membantu pengimplementasian Konvensi oleh negara-negara berkembang.

Keenam tentang tindakan pencegahan. Pasal 31 Konvensi dan ketiga protokolnya menyerukan negara-negara peserta untuk melakukan tindakan untuk mencegah segala bentuk kejahatan transnasional terorganisir. Termasuk di dalamnya tindakan keamanan dalam bentuk pencegahan, pelatihan bagi aparat, data pencatatan umum tentang kejahatan dan yang khusus untuk pengawasan kegiatan-kegiatan kunci, seperti impor dan ekspor senjata api, penerbitan dan verifikasi dokumen perjalanan. Dan yang *ketujuh*, berisikan ketentuan lain-lain. Sebagaimana halnya konvensi internasional pada umumnya, bagian akhir Konvensi berisikan bahwa Konvensi terbuka untuk ditandatangani pada upacara penandatanganan di Palermo, Itali sejak tanggal 12 hingga 15 Desember 2000 dan setelah itu di Markas Besar PBB di New York sejak tanggal 12 Desember 2000 hingga tanggal 12 Desember 2002.

Kejahatan Menurut Konvensi

Berdasarkan Konvensi tersebut, negara-negara peserta yang belum melakukan kriminalisasi diharuskan melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan terorganisir, termasuk partisipasi dalam kegiatan organisasi kejahatan, mengorganisasikan, mengarahkan, membantu, bersekongkol, memfasilitasi atau memberikan nasehat untuk kegiatan

kejahatan terorganisir (Pasal 5). Mengenai pencucian uang, negara peserta diwajibkan pula untuk mengkriminalisasikannya, dan meliputi juga menyembunyian uang dan semua hasil-hasil kejahatan, yang tidak terbatas dalam bentuk uang tunai tetapi juga yang dalam bentuk harta benda (*property*) lainnya (Pasal 6). Dalam hal ini juga termasuk segala bentuk pengalihan (*transfer*) ataupun konversi harta benda yang bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul harta tersebut. Termasuk juga cara-cara perolehan atau kepemilikan harta tersebut, apabila yang bersangkutan mengetahui bahwa harta tersebut berasal dari hasil kejahatan. Pasal 7 Konvensi mengharuskan negara untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan administratif yang diperlukan untuk mengatur kegiatan finansial guna mempersulit upaya menyembunyian uang hasil dari kejahatan; memfasilitasi pendeteksian, pengusutan dan penuntutan pencucian uang; dan menyediakan bantuan internasional atau kerjasama dalam kasus-kasus pencucian uang.

Korupsi yang berhubungan dengan kejahatan transnasional terorganisir harus dikriminalisasikan. Termasuk ke dalam kejahatan ini tindakan-tindakan menawarkan, memberikan, mencoba mendapatkan atau mengumpulkan atau menerima segala bentuk penyuapan, mendapatkan keuntungan tidak pantas atau bentuk-bentuk bujukan yang lain, jika penerima yang dituju adalah pejabat publik dan maksud dari penyuapan itu berhubungan dengan fungsi resmi yang dijabatnya (Pasal 8). Pasal 12 sampai 14 berisikan ketentuan tentang penyitaan dan pemusnahan uang atau barang yang dihasilkan atau digunakan dalam kejahatan. Dalam hal ini diatur pula tentang kerjasama internasional dalam penyitaan hasil kejahatan tersebut. Dalam hal penyitaan, biasanya yang penanganannya dilakukan oleh negara tempat dimana ditemukannya barang tersebut tetapi dapat bersama negara lain dalam hal diperlukan untuk pembayaran kompensasi atau restitusi bagi korban atau untuk maksud lain, ataupun untuk disumbangkan kepada badan antar pemerintah yang mengurus kejahatan transnasional yang terorganisir (Pasal 14)

Kerjasama Internasional

Ketentuan mengenai ekstradisi dan bantuan hukum secara timbal balik dalam Konvensi lebih luas dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian internasional (regional dan bilateral) mengenai hal yang sama. Kelebihannya dari Konvensi dan protokol-protokolnya ini adalah adanya anjuran untuk mengembangkan lebih jauh kerjasama regional dan bilateral dalam ekstradisi dan bantuan hukum secara timbal balik, melebihi dari standar yang ditentukan oleh instrumen ini. Berdasarkan Pasal 16, ekstradisi dari negara lain dapat dimintakan untuk keempat jenis kejahatan yang dirinci dalam Konvensi, atau

untuk “setiap kejahatan serius” dimana kelompok kejahatan terorganisir tersebut terlibat yang kejahatannya merupakan tindak pidana menurut hukum nasional dari kedua negara yang bersangkutan. Sedangkan kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam protokol hanya dapat diekstradisikan jika memenuhi persyaratan ini atau dirinci oleh protokol yang bersangkutan.

Ekstradisi didasarkan kepada persyaratan yang ditentukan oleh hukum nasional negara pemohon ekstradisi atau didasarkan kepada perjanjian bilateral atau multilateral [Pasal 16(7)]. Permintaan ekstradisi dapat ditolak apabila ada alasan kuat bahwa permintaan itu didasarkan kepada alasan diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, atau keyakinan politik dari tersangka dan bukan karena kejahatan yang dilakukannya. Negara peserta juga dapat menolak mengekstradisikan warganegaranya asalkan penuntutan dilakukan di negara yang bersangkutan [Pasal 16(10)].

Untuk jenis-jenis kejahatan yang tercantum dalam Konvensi, bantuan hukum secara timbal balik seluas mungkin dapat dimintakan oleh suatu negara peserta kepada negara peserta lainnya untuk maksud pengusutan, penuntutan atau proses pengadilan (Pasal 18). Ketentuan ini dapat digunakan untuk memperoleh keterangan atau bukti-bukti lain, mengadakan pencarian atau penyitaan, dokumen-dokumen hukum, pemeriksaan obyek atau tempat, catatan bank atau perusahaan dan lain-lain, memfasilitasi kehadiran seseorang di negara pemohon atau bentuk-bentuk bantuan yang diperkenankan oleh hukum nasional negara-negara yang bersangkutan [Pasal 18 (3)]. Signifikansi dari Pasal 18 Konvensi adalah diperkenankannya setiap bentuk pembuatan catatan tertulis (Ayat 14) yang memungkinkan penggunaan media elektronik untuk mempercepat kelancaran proses, sepanjang negara yang bersangkutan tidak keberatan dengan keaslian, keamanan, dan kerahasiaannya. Penggunaan *video conference* juga diperkenankan untuk memperoleh kesaksian [Pasal 18 (18)]. Disamping dapat mempercepat proses, hal ini tentunya dapat menghemat biaya atau untuk kenyamanan saksi, serta sangat membantu partisipasi korban dan saksi yang mungkin mengalami hambatan untuk melakukan perjalanan.

Permintaan bantuan hukum dapat ditolak jika permintaan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Konvensi [Pasal 18 (14, 15, 21)]; jika kejahatan tersebut tidak termasuk kejahatan menurut hukum nasional kedua negara [Pasal 18 (9)]; jika bantuan tersebut akan membahayakan kepentingan utama dari negara pemohonan, seperti, kedaulatan, keamanan dan ketertiban umum; atau jika tidak sejalan dengan konstitusi ataupun persyaratan hukum yang sangat

fundamental atau bertentangan dengan sistem hukum negara yang diminta [Pasal 18 (21d)]. Permintaan bantuan hukum tidak dapat ditolak dengan alasan kerahasiaan bank (Pasal 18 (8)) atau karena alasan karena kejahatan yang dituduhkan berkaitan dengan masalah perpajakan [Pasal 18 (22)]. Bantuan dapat ditangguhkan untuk melindungi investigasi yang sedang dilakukan [Pasal 18 (25)]. Untuk itu Konvensi memberikan rincian mengenai alasan-alasan dan konsultasi antar pemerintah jika bantuan itu ditangguhkan atau ditolak [Pasal 18 (23 dan 26)].

Konvensi juga mengatur tentang dasar-dasar untuk melakukan investigasi bersama (Pasal 19), dan kerjasama dalam proses investigasi, seperti pengawasan secara elektronik dan kerjasama dalam penegakan hukum (Pasal 20 dan 27). Untuk peningkatan keahlian melalui pelatihan, Konvensi juga mendorong pengembangan program pelatihan dan bantuan teknis (Pasal 29 dan 30).

Perlindungan Korban dan Saksi

Dalam kejahatan transnasional yang terorganisir, perlindungan korban dan saksi menjadi sangat penting karena pada mereka lah bukti yang diperlukan berada, tetapi mereka potensial terancam oleh pihak pelaku kejahatan yang terorganisir. Untuk itu Konvensi mewajibkan negara-negara peserta untuk mengambil langkah-langkah perlindungan mereka dari segala bentuk intimidasi atau balas dendam. Perlindungan ini meliputi perlindungan fisik, relokasi dan penyembunyian identitas. Untuk itu Konvensi juga menganjurkan agar mengembangkan program relokasi internasional (Pasal 24).

Pokok-pokok Protokol

Sebagaimana disinggung di atas, Konvensi dilengkapi dengan tiga protokol yang ditujukan khusus bagi jenis-jenis kejahatan tertentu, yaitu: perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak; penyelundupan migran; serta manufaktur dan perdagangan gelap senjata api. Protokol pertama dilatarbelakangi kenyataan bahwa perdagangan manusia, khususnya wanita anak-anak untuk dieksploitasi baik sebagai buruh paksa maupun sebagai budak seks, kerap dilakukan oleh organisasi kejahatan transnasional. Protokol ini dimaksudkan agar tindakan untuk memerangi dan mencegah, termasuk pencarian dan penghukuman pelaku kejahatan ini dilakukan bersama oleh negara-negara. Untuk itu Protokol menyerukan kerjasama internasional agar upaya tersebut efektif. Protokol juga mengatur perlindungan korban dan pengembalian ke negara asalnya dengan selamat atau untuk menempatkannya di negara ketiga. Akhirnya Protokol juga memberikan acuan pengaturan mengenai informasi publik berikut

konsekuensinya baik bagi pelaku maupun bagi korban atau yang potensial menjadi korban.

Protokol kedua didasari oleh kenyataan bahwa akhir-akhir ini organisasi kejahatan transnasional telah mengembangkan jaringan yang sangat canggih dan luas untuk menyelundupkan migran sebagai upaya untuk meraup keuntungan dari kesengsaraan orang yang hendak memperbaiki nasibnya di negara lain. Protokol tentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Udara dan Laut, dimaksudkan untuk mengkriminalisasikan perbuatan penyelundupan migran dan pelakunya. Untuk itu diatur pula tentang tindakan-tindakan khusus dan kerjasama yang diperlukan guna memerangi penyelundupan ini, termasuk dalam pengejaran pelaku dan penghukumannya.

Protokol ketiga tentang Pembuatan dan Perdagangan Gelap Senjata Api, Amunisi dan Bahan-bahan Lain, juga dibentuk berdasarkan kesadaran masyarakat internasional bahwa kejahatan ini selalu berhubungan dengan jenis-jenis kejahatan yang menjadi bidang kegiatan kejahatan transnasional yang terorganisir, seperti obat bius dan terorisme. Protokol ini pun dimaksudkan agar dilakukan kriminalisasi oleh negara-negara dalam rangka menghapuskan pembuatan dan perdagangan gelap senjata api dan bahan-bahan lainnya. Protokol juga menghendaki pengendalian yang terhadap ekspor dan impor barang tersebut, termasuk pertukaran informasi dan kerjasama internasional lainnya.

Penutup

Upaya masyarakat internasional untuk memerangi kejahatan transnasional yang terorganisir dan untuk menghukum pelakunya dilatarbelakangi oleh semakin maraknya kegiatan kelompok penjahat ini seiring dengan semakin meningkatnya kemajuan sarana komunikasi dan interaksi global. Karena kegiatan kejahatan ini bersifat lintas batas negara, maka upaya untuk memerangi dan menghapuskannya secara efektif pun mustahil dilakukan secara sendiri-sendiri oleh negara-negara. Namun demikian upaya ini harus dimulai dengan pembenahan peraturan perundang-undangan nasional setiap negara, disamping sarana dan prasarana pendukungnya, termasuk pembenahan aparat terkait. Konvensi dan ketiga protokolnya mencantumkan standar yang wajib dilakukan negara-negara pesertanya baik dalam pembenahan legislasi, administrasi dan penegakan hukumnya, termasuk dalam hal peningkatan keahlian dan sumber dayanya.

Konvensi ini telah ditandatangani oleh 147 negara dan diratifikasi oleh 82 negara, tidak termasuk Indonesia. Protokol Perdagangan Manusia telah ditandatangani oleh 117 negara sedangkan

peratifikasinya sejumlah 64. Protokol tentang Penyelundupan Migran ditandatangani oleh 112 negara dan diratifikasi oleh 57 negara, sedangkan Protokol tentang Pembuatan dan Perdagangan Gelap Senjata Api ditandatangani oleh 52 negara dan diratifikasi oleh 22 negara. Tentu saja kesemua protokol ini belum diratifikasi Indonesia karena Konvensi utamanya saja belum diratifikasi.

Indonesia sebagai negara yang menghadapi permasalahan dalam mencegah dan memerangi kegiatan kejahatan terorganisir yang menjadi lingkup Konvensi dan ketiga protokolnya tentu sangat berkepentingan dengan instrumen hukum ini baik sebagai standar dalam perumusan peraturan perundang-undangan maupun dalam upaya pemberantasan dan penegakan hukumnya. Maraknya korupsi dan pencucian uang, terorisme, perdagangan wanita dan anak-anak, serta penyelundupan migran (baik sebagai negara tempat transit, tujuan maupun pengirim), menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memeranginya. Demikian pula halnya dengan, meningkatnya peredaran senjata api gelap dan amunisi yang sangat mencolok di daerah konflik dan dalam kegiatan terorisme di tanah air, juga menunjukkan bahwa diperlukan kesungguhan untuk mencegah dan menanggulangnya.

Konvensi dan ketiga protokolnya yang membuka kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan terorganisir ini perlu untuk segera dikaji secara mendalam agar dapat segera diratifikasi (diaksesi) Indonesia.